

D. KAMUS INDIKATOR

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
<i>Impact</i>		
1.	Capaian Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: adalah capaian kinerja pembangunan dalam satu tahun anggaran, yang merupakan capaian target kinerja prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PPN/Bappenas. ● Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS).
2.	<i>Corruption Perception Index</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang diterbitkan oleh lembaga internasional untuk mengukur tingkat persepsi korupsi suatu negara. Indikator ini merupakan ukuran daya saing global dalam penanganan korupsi. Skor dan peringkat komponen indeks ditetapkan oleh lembaga internasional yang mengeluarkan indeks. Pengukurannya dilakukan melalui survei. ● Sumber data: Laporan lembaga internasional yang mengeluarkan indeks.
3.	<i>E-Government Development Index</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang diterbitkan oleh lembaga internasional untuk mengukur tingkat pengembangan dan implementasi transformasi digital tata kelola pemerintahan suatu negara. Indikator ini merupakan ukuran daya saing global dalam implementasi transformasi

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
		<p>digital tata kelola pemerintahan suatu negara. Skor dan peringkat komponen indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional yang mengeluarkan indeks. Pengukurannya dilakukan melalui survei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan lembaga internasional yang mengeluarkan indeks.
4.	<i>Ease of Doing Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang diterbitkan oleh lembaga internasional untuk mengukur iklim kemudahan berbisnis pada suatu negara. Indikator ini merupakan ukuran daya saing global dalam iklim kondusif berbisnis. Skor dan peringkat komponen indeks dikeluarkan oleh lembaga internasional yang mengeluarkan indeks. Pengukurannya dilakukan melalui survei • Sumber data: Laporan lembaga internasional yang mengeluarkan indeks.
<i>Outcome</i>		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. <p>Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (<i>immediate outcomes</i>) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran</p>

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
		<p>strategis yang merupakan <i>outcomes</i> dari implementasi kebijakan (<i>intermediate outcomes</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan kementerian/lembaga yang menjadi <i>leading institution</i> kebijakan RB pada tingkat meso. • Sumber data: Hasil penilaian implementasi kebijakan oleh <i>leading institution</i>, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta Survei Eksternal dan Internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei <i>Employer Branding</i> ASN.

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
1.	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur capaian penerapan SPBE pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan tingkat nasional. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik.

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian. • Sumber data: Hasil penilaian SPBE Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu 1) kontribusi kementerian/lembaga/pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D); dan 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang RBKUNWAS untuk menilai capaian indikator kinerja utama kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menilai Capaian kontribusi kementerian/lembaga terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional • Sumber data: Hasil Monev RKP Kementerian PPN/Bappenas; Laporan hasil evaluasi akuntabilitas

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		kinerja Deputi Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB, Laporan evaluasi LPPD Ditjen Otonomi Daerah, Laporan Capaian Indikator makro pembangunan BPS.
3.	Capaian Akuntabilitas Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1) tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ● Sumber data: Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan Hasil Monev tindak lanjut rekomendasi BPK.

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
1.	Nilai <i>Employer Branding</i> ASN	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menerima pelayanan.

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Hasil survei <i>employer branding</i>
2.	Indeks BerAKHLAK	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Hasil survei BerAKHLAK ASN.
3.	Nilai Survei Penilaian Integritas	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu <i>stakeholder</i> yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ● Sumber data: Hasil SPI KPK.

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
4.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik. ● Sumber data: Hasil SKM.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
1.	kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. ● Sumber data: Laporan hasil Monev.
2.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan sistem kerja baru	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
	dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	<p>pegawai ASN. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
3.	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres sebagai kementerian/lembaga/pemerintah daerah penanggungjawab. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
4.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi keselarasan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan perencanaan

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<p>pembangunan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). ● Sumber data: Laporan Hasil Monev, Laporan
5.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
6.	Kementerian/lembaga yang telah mengimplementasikan pelayanan publik digital	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan pelayanan publik digital oleh kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<p>pelayanan publik digital pada kementerian/lembaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik ● Sumber data: Laporan hasil Monev.
7.	Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi MPP digital oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan MPP Digital pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik ● Sumber data: Laporan hasil Monev .
8.	Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI per kementerian/lembaga/pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja WBK/WBBM oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan evaluasi atas implementasi kebijakan ZI pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan ● Sumber data: Laporan hasil evaluasi.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
9.	Tingkat maturitas SPIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Instansi Pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SPIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi BPKP.
10.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB yaitu Deputy Bidang Pelayanan Publik. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev Pengaduan LAPOR Kementerian PANRB.
11.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan tingkat kualitas kebijakan publik Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Lembaga Administrasi Negara.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none">• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Lembaga Administrasi Negara.
12.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.• Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian Hukum dan HAM.• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Kementerian Hukum dan HAM.
13.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan tingkat kualitas pengelolaan arsip digital Baik	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan arsip digital pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.• Instansi penanggung jawab pengukuran: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).• Sumber data: Laporan Hasil Monev ANRI
14.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan data statistik sektoral dengan Baik	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyelenggaraan data statistik

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<p>sektoral pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pusat Statistik (BPS). ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi BPS.
15.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas kebijakan tata kelola pengadaan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi LKPP.
16.	Kementerian/lembaga yang Kualitas Pengelolaan Anggaran Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan anggaran pada kementerian/lembaga. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pada kementerian/lembaga. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kemenkeu ● Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
17.	Kementerian/lembaga yang Pengelolaan Asetnya Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan asset pada kementerian/lembaga. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan aset pada kementerian/lembaga. • Instansi penanggung jawab pengukuran: Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. • Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
1.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur • Sumber data: Laporan hasil Monev
2.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan manajemen talenta oleh

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
	Baik	<p>kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Manajemen Talenta ASN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur• Sumber data: Laporan hasil Monev
3.	Badan Diklat kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN dengan Baik	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan sistem pembelajaran terintegrasi ASN oleh Badan Diklat kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.• Instansi penanggung jawab pengukuran: Lembaga Administrasi Negara (LAN).• Sumber data: Laporan Hasil Monev.
4.	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan rekrutmen pegawai ASN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan rekrutmen pegawai ASN yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersentral oleh BKN dan sistem di internal

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
		<p>kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur• Sumber data: Laporan Hasil Monev.
5.	Tingkat implementasi Platform digital ekosistem pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Platform digital ekosistem manajemen ASN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah• Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Platform digital ekosistem manajemen ASN yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersentral oleh BKN dan sistem di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.• Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur• Sumber data: Laporan Hasil Monev.
6.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik	<ul style="list-style-type: none">• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.• Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
		<p>PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Hasil Monev.
7.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah • Instansi penanggung jawab pengukuran: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) & Badan Kepegawaian Negara (BKN). • Sumber data: Laporan Hasil Monev KASN dan Evaluasi BKN.
8.	Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Indeks Pelayanan Publik Baik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik & Ombudsman RI. • Sumber data: Laporan Hasil Monev Deputi Bidang

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
		Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS